

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018

Ilham¹ dan Titin Purwaningsih²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
E-mail: ilhamumy16@gmail.com

ABSTRAK. Hadirnya kotak kosong yang menjadi lawan pasangan tunggal dalam pemilihan walikota 2018 disebabkan karena terdiskualifikasinya calon petahana yang dianggap melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilukada yang di laporkan oleh tim dari pasangan penantangannya dalam hal ini Appi-Cicu selaku pasangan calon yang ikut bertarung dipemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan turun langsung kelapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada dilokasi penelitian dan wawancara secara langsung kepada informan. Selanjutnya data dari responden dikelolah dengan menggunakan rumus skala indeks kemudian melalui analisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat menangnya kotak kosong terhadap calon tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menangnya kotak kosong dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 karena ketidakpercayaan masyarakat yang sebagai pemilih kepada calon tunggal yang dianggap sebagai pendatang/wajah baru. Sebagai bentuk kecerdasan masyarakat Kota Makassar dalam berdemokrasi yang dianggap mampu mengurangi terjadinya politik uang. Kemudian bukti kejenuhan masyarakat terhadap partai politik yang hanya mengusung satu pasangan calon sehingga dianggap tidak mampu menghadirkan kandidat calon sebagai representatif ketika hanya satu pasangan calon. Kemudian adalah pertarungan antara kekuatan kecerdasan masyarakat Kota Makassar sebagai pemilih melawan oligarki politik.

Kata Kunci: Perilaku pemilih; Demokrasi; Kotak Kosong

THE FACTORS AFFECTS VOTER'S BEHAVIOR IN EMPTY BOX WINNING OF MAYORS MAKASSAR 2018

ABSTRACT. The presence of an empty box becomes the opponent of a single pair in the mayoral election 2018 is due to the disqualification of the incumbent candidate who is considered to have committed a violation in the post-conflict local election stages reported by the team of the challenger, in this case, Appi-Cicu as the candidate pair who participated in the election of the mayor and deputy mayor Makassar. The type of research is a mixed-method. In data collection, this research was carried out directly to the field by distributing questionnaires to respondents who were in the research location and directly interviewing informants. Furthermore, data from respondents are processed by using an index scale formula, and then it is analyzed and concluded. The purpose of this research is to know the winning of empty boxes against single candidates. The results showed that the winning of the empty box in Makassar mayoral election 2018 was due to the distrust of the people who as voters for a single candidate that was considered a newcomer. As a form of intelligence of the people of Makassar City in a democracy that is considered capable of reducing the occurrence of money politics. Then, the evidence of public saturation with political parties that only carry one pair of candidates so that it is considered unable to present a candidate as a representative when it is only one pair of candidates. Then there was the battle between the intelligence power of the people of Makassar City as voters against the political oligarchy.

Keywords: Voter behavior; Democracy; Empty Box

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang dalam fungsi pemerintahannya menggunakan sistem demokrasi. Sebagai wujud daripada sistem demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung. Pemilihan umum merupakan bentuk dari legalitas yang diberikan kepada

rakyat untuk memilih presiden, gubernur, walikota/bupati sesuai dengan hati nuraninya yang sifatnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Pemilihan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya pergantian pemerintahan atau mencari pemerintah yang baru baik yang akan mempertahankan kekuasaannya maupun yang sudah akan meninggalkan kekuasaannya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan uji materil yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya tentang pemilihan gubernur, bupati/walikota menjadi sebuah dinamika baru di dalam pemilihan umum di Indonesia, dalam regulasi yang diberlakukan dikatakan bahwa bagi daerah yang hanya memiliki satu kandidat calon pasangan diperbolehkan melaksanakan ikut dalam Pemilukada secara serentak. Kemudian berkaitan adanya regulasi yang di atur tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara lebih memperkuat dengan membuat Peraturan KPU dengan nomor 14 tahun 2015 terkait Pemilihan umum gubernur, bupati/walikota dengan satu calon pasangan. Maka proses pengajuan permohonan tentunya untuk mendukung proses yang lebih demokratisasi (Kusuma et al., 2018).

Sejarah panjang Negara Indonesia dalam menganut sistem demokrasi dengan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat sebuah polemik baru dengan munculnya sebuah fenomena kotak kosong (koko) yang oleh banyak orang dianggap sebagai sebuah keajaiban dalam proses berdemokrasi, karena banyak kalangan masyarakat menilai bahwa jika kandidat kepala daerah yang melawan kotak kosong sudah bisa dipastikan 75% akan mengalami kemenangan, akan tetapi ini semua berbanding terbalik dengan prediksi masyarakat.

Kekalahan calon tunggal pada pemilihan Walikota Makassar merupakan sebagai bukti dan bentuk pembelajaran bagi kandidat calon yang punya keinginan bertarung dalam kontestasi 5 tahun sekali khususnya di Kota Makassar. Partai politik yang menjadi kendaraan untuk bisa bertarung tidak menjadi lagi tolak ukur untuk memenangkan sebuah pemilihan. Buktinya dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, pasangan calon tunggal yang diusung oleh 10 Parpol yaitu Partai Golkar, Nasdem, PKS, PDI-Perjuangan, Gerindra, Hanura, PPP, PKB, PBB, dan PKPI, yang artinya mayoritas semua partai politik yang lolos tahapan pemilihan semuanya dikuasai oleh calon tunggal tetap kalah melawan kotak kosong. Kekalahan calon tunggal juga menunjukkan bahwa mesin politik dari calon tunggal baik dari partai pendukung, relawan dan tim sukses tidak bekerja optimal. Padahal dengan banyak partai yang mendukung kemenangan tentunya

sudah di depan mata karena lawannya hanya kotak kosong yang tentunya tidak mempunyai mesin penggerak. Kemudian kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi pengkaderan yang hanya cenderung bersikap pragmatis dan memilih calon instan atau populer karena takut kalah. Kemudian calon figur yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat (Rini, 2016).

Dalam artikel penelitian ini tentunya peneliti memfokuskan mengkaji permasalahan-permasalahan terkait faktor perilaku pemilih yang menjadi judul pada tulisan ini, dengan melakukan 3 pendekatan yang terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Meskipun pada dasarnya ketiga pendekatan tersebut ada saling keterkaitannya dalam mengetahui bagaimana kemenangan kotak kosong.

Pada pendekatan faktor sosiologi kecenderungan pemilih melihat dari pada aspek kultur atau pun budaya, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Pratiwi (2017: 2) Menunjukkan bahwa perilaku politik melalui pendekatan Sosiologis dimana dilihat dari faktor latar belakang lingkungan tempat tinggal (faktor kedaerahan) dan faktor lingkungan keluarga.

Begitu juga dari faktor pendekatan psikologi yang dikemukakan oleh Sangkoy et al. (2019) Mengatakan bahwa Pendekatan dalam psikologis menjadi yang lebih efektif untuk pendekatan dalam menggaet suara masyarakat pemilih, dimana hubungan seseorang dengan calon kandidat menjadi modal awal kampanye bagi calon pasangan karena melihat figur dari kandidat kepala daerah, selain itu tentu melihat dari figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok yang bisa menjadi idaman bagi masyarakat dan dengan kedekatan psikologisnya dengan suatu organisasi atau partai politik yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat pemilih untuk memberikan hak suara. Sehingga dalam ini, sekaligus juga tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan soal Pilkada satu pasangan calon dan implikasinya, terutama mengenai gerakan sosial yang kemungkinan terjadi, serta menjadi pembelajaran politik dan demokrasi bagi Indonesia untuk mekanisme Pemilu dan Pilkada untuk mencapai hasil yang sesuai yang diharapkan (Abbas, 2018:1-12).

Muluk (2012) & Haryanto (2000) mengartikan perilaku pemilih sebagai aktivitas kegiatan yang tentu dilakukan oleh seorang masyarakat

yang punya hak untuk ikut memberikan pilihan dan tentu sudah terdaftar sebagai pemilih untuk selanjutnya tinggal melakukan pencoblosan melalui kertas suara untuk menentukan wakil-wakilnya. Sementara menurut Surbakti (2010) perilaku memilih diartikan sebagai kewajiban pemberian suara oleh individu yang erat kaitannya dengan mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or no to vote*) di dalam sebuah pemilihan maka *voters* menjadi memilih dan dapat memberi dukungan terhadap kandidat tertentu.

Salah satu wujud daripada sistem demokrasi tentu adanya dinamika partai politik (Djuyandi, 2018), maupun dari protes masyarakat selaku pemilih seperti yang di kemukakan oleh Kselman & Niou (2014). Protes pemilih ini adalah varian dari pemungutan suara taktis karena ini melibatkan pemungutan suara untuk partai atau kandidat yang kurang disukai daripada favorit seseorang. Memprotes pemilih memilih partai lain untuk menandakan ketidakpuasan dengan kandidat yang paling mereka sukai, yang mereka yakin akan menang. Protes ketidakpuasan yang berusaha disampaikan oleh pemilih biasanya dipahami sebagai model tata ruang yang protes akan menggunakan suara mereka sebagai alat pemberi sinyal. Menemukan faktor paling penting yang mempengaruhi pilihan protes adalah posisi masalah dan efek kampanye. Karena temuan menunjukkan bahwa protes suara adalah fenomena kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi reaksi anti-politik (Birch et al., 2017).

Selanjutnya Haliim (2017: 2) mengungkapkan bahwa perilaku politik masyarakat antara lain adalah, adanya nilai hubungan dalam keluarga yang pengaruhnya pada pendekatan psikologis politik perilaku memilih, sehingga komunikasi yang baik dengan masyarakat juga bisa terjalin hubungan kepercayaan antara kandidat calon dan pemilih, begitu pun pertukaran ekonomi dan pengaruhnya terhadap perilaku politik memilih, agar transformasi terjadi dari masyarakat pemilih kepada kandidat calon.

Implementasi dari sistem demokrasi tentu adanya pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan gubernur, bupati maupun walikota yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga dalam kontestasi tersebut tentu ada yang kalah dan ada yang menang seperti pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar, yang

menjadi fenomena karena calon tunggal kalah dari kolom kosong/kotak kosong. Melihat dari fenomena kemenangan kotak kosong tentu ada hal yang menjadi substansial seperti yang dikemukakan oleh (Romli, 2018:726) yang menyatakan bahwa faktor yang berkaitan dengan kemenangan kotak kosong di Kota Makassar. 1) Sebagai protes kepada partai politik, 2). Bentuk perlawanan atas kegagalan Danny Pomanto selaku petahana maju sebagai calon walikota karena didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung (MA), 3). Basis Massa yang memilih kotak kosong adalah basis Massa dari Danny Pomanto, sehingga Danny Pomanto dianggap sebagai tanda atas perlawanan terhadap demokrasi di Kota Makassar. 4). Sebagai bentuk protes dan resistensi terhadap pengaruh dan dominasi para pemilik kepentingan.

Mahardika (2018: 69-84) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam pemilihan umum dengan kemenangan kotak kosong menjadi sebuah fakta adanya ketidakpuasan dan sekaligus kritikan masyarakat terhadap partai politik yang tidak mampu memberikan fungsi sebagai organisasi kaderisasi dalam melakukan pendidikan partai politik untuk menghadirkan calon kandidat yang layak untuk didukung, serta membuktikan pula bahwa calon tunggal yang diusung oleh semua partai politik belum tentu mendapat dukungan oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat Moonti (2018: 445-451) dengan menyatakan bahwa fenomena kotak kosong sudah bukan menjadi hal yang langka lagi hal ini terjadi karena proses demokrasi yang belum merata disebabkan oleh beberapa partai politik yang berada di daerah belum mampu untuk menyiapkan kader yang akan dipersiapkan dalam pemilihan kepala daerah serta syarat dukungan perseorangan yang susah untuk dipenuhi oleh para kontestan.

Darmawan (2017: 45-51) mengemukakan bahwa peran dari pendukung kotak kosong dengan memfokuskan pada isu yang urgensi dan ada kepedulian anggota kelompok mereka dengan memanfaatkan kesempatan lobi, serta membuka akses ke pembuat aturan dengan cara melakukan advokasi. Kemudian sejalan dengan yang di kemukakan Khaerah, Junaedi, & muslimin (2018: 69-84) adalah merupakan bentuk dari bagian sikap politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Enrekang yaitu karena tumbuhnya

kesadaran politik masyarakat serta adanya upaya tim dari pemenang kotak kosong dalam mensosialisasikan kegagalan-kegagalan dari bupati petahana selama menjabat satu periode. Begitu hal yang sama dengan Sari (2019) mengemukakan bahwa secara parsial ada pengaruh antara kampanye yang tidak baik terhadap perilaku memilih kotak kosong, ada pengaruh terhadap dominasi calon petahana terhadap perilaku memilih kotak kosong, dan secara sengaja calon petahana terlalu berpihak kepada para pemodal dan terhadap sikap memilih kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Pati 2017. Fakta yang lain bahwa dalam proses implementasi belum terlihat adanya jaminan atau pemenuhan hak secara utuh bahwa Pilkada yang diikuti calon tunggal sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan perspektif HAM. Sama halnya dalam konteks Pilkada, salah satu ukuran kontestasi dan demokratisasi dalam perspektif HAM adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang bagi warga negara (Djuyandi, 2018; Mikail, 2015).

Hadirnya calon tunggal melawan kotak kosong dalam pilkada serentak tentu melahirkan sebuah problem yang cukup serius seperti yang di kemukakan oleh (Rini, 2016) menunjukkan berkaitan dengan proses pelaksanaan pilkada secara serentak yang diikuti hanya satu calon pasangan kandidat, ternyata terdapat beberapa permasalahan seperti masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara tentang mekanisme dan proses pencoblosan surat suara. Masih kuatnya dominasi kepentingan elit politik penguasa dan tentunya ketidakberhasilan partai politik sebagai organisasi kaderisasi untuk memberikan pendidikan politik sehingga melahirkan kader yang dapat diusung sebagai kandidat calon.

Kemudian faktor lain seperti yang di kemukakan oleh Parahita (2017), dari temuan dan hasil analisis data sebagai berikut:

- a. Regulasi yang tidak berpihak pada rakyat dan menguntungkan pemodal. Aturan yang tidak memihak kepada rakyat dan selalu tidak sejalan dengan aspirasi serta kepentingan banyak masyarakat.
- b. Sikap egois dari petahana yang melakukan sosialisasi awal untuk memperkenalkan sosok Saiful Arifin untuk dijadikan sebagai wakilnya pada pemilihan selanjutnya.
- c. Citra politik Haryanto yang selama menjabat selama kurang lebih 5 tahun dalam membuat regulasi kurang mencakup apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ditambah lagi terjadinya praktek nepotisme dan pembangunan yang tidak menyeluruh.
- d. Adanya protes keras dari Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati.
- e. Memberikan izin dibangunnya pabrik semen yang keputusan tersebut dianggap tidak memperdulikan hak rakyat, serta tidak menepati janji kepada masyarakat.
- f. Figur Budiyo sebagai wakil bupati yang mampu meyakinkan masyarakat Margo-yoso dan memberikan pengaruh dengan menggerakkan untuk tidak memilih/mendukung Haryanto
- g. AKDPP terkontaminasi oleh kepentingan elit penguasa/oligarki.

Artinya dengan bermodalkan materil yang sangat mendukung, calon kandidat tidak memberikan peluang terhadap calon kandidat yang lain untuk memperoleh dukungan. Meskipun keberadaanya jelas tidak bisa dipermasalahkan, karena pada substansinya pilkada merupakan sebuah pertarungan untuk dapat memperoleh kemenangan dan menduduki sebuah jabatan kekuasaan. Akan tetapi yang tidak benarnya adalah tidak adanya keberanian melakukan kompetisi dalam kontestasi pilkada, Sehingga calon menganggap lawan sudah terkalahkan sebelum ikut didalam pemilihan. Sehingga kalimat yang pas/cocok untuk kondisi yang terjadi dengan situasi ini yaitu sebagai bukti keserakahan dalam proses memperoleh kekuasaan. Dengan demikian seyogyanya kontestasi yang terbaik adalah saat ada lawan yang diperhadapkan, sehingga apabila dalam memperoleh kemenangan yang didapatkan, atau justru sebaliknya, tentunya itu merupakan sebuah bukti yang real sebagai wujud ketangguhan dan suatu konsekuensi yang logis sebagai seorang petarung.

Meskipun penelitian yang dilakukan ini hampir sama dengan beberapa penelitian sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Parahita (2017) yang lebih memfokuskan penelitiannya dengan beberapa faktor yang berpengaruh misalnya kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan penelitian berfokus pada basis pemenangan di beberapa kecamatan. Penelitian yang dilakukan Mahardika (2018)

hampir menyerupai penelitian ini namun hanya berfokus pada mekanisme regulasi dan implementasinya.

Selanjutnya Sari (2019) mengemukakan ada pengaruh antara kampanye yang kurang baik dan dominasi calon petahana kepada pemilik modal terhadap sikap pemilih kotak kosong pada Pemilukada Kabupaten Pati 2017. Adapun Moonti (2018) mengatakan bahwa adanya proses demokrasi yang belum merata disebabkan oleh beberapa partai politik yang berada didaerah belum mampu untuk menyiapkan kader yang akan dipersiapkan dalam pemilihan kepala daerah serta syarat dukungan perseorangan yang susah untuk dipenuhi oleh para kontestan. Sehingga yang membedakan dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada aspek pilihan rasional. Sehingga dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti berkesimpulan penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya, kemudian yang cukup menarik karena pertama kali terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah kotak kosong menang melawan calon tunggal.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dan secara mendalam apa yang menjadi permasalahan dengan tiga prespektif pendekatan yaitu Sosiologi, Psikologi serta Pilihan Rasional. Kemudian penelitian ini menggunakan metode *Mixed Methods Research*. *Mixed Methods Research* merupakan pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebagai bagian dari prosedur riset yang menghadirkan gambaran data yang berupa kata-kata. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metodologi yang digunakan dalam menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antar variabel. Untuk itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau lebih difokuskan pada data primer, kemudian menyebarkan kuesioner kepada 250 responden, selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner diolah menggunakan skala indeks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perolehan selisi suara yang terjadi pada pilwalkot di Kota Makassar merupakan

sebuah gambaran dari perilaku pemilih yang menjalankan fungsi demokrasi dengan adanya perbedaan pilihan antara calon tunggal dengan kotak kosong, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Kecamatan	Appi-Cicu	Kolom kosong	Suara sah	Suara tidak sah	Total
Biringkanaya	36.092 (47.86%)	39.320 (52.14%)	75.412	?	?
Bontoala	10.584 (47.06%)	11.907 (52.94%)	22.491	?	?
Kepulauan Sangkarrang	3.261 (47.22%)	3.645 (52.78%)	6.906	?	?
Makassar	13.654 (39.31%)	21.081 (60.69%)	34.735	?	?
Mamajang	10.886 (44.81%)	13.407 (55.19%)	24.293	?	?
Manggala	30.384 (52.37%)	27.631 (47.63%)	58.015	?	?
Mariso	11.566 (47.38%)	12.845 (52.62%)	24.411	?	?
Panakkukang	25.069 (44.63%)	31.108 (55.37%)	56.177	?	?
Rappocini	29.844 (47.90%)	32.460 (52.10%)	62.304	?	?
Tallo	26.297 (47.45%)	29.122 (52.55%)	55.419	?	?
Tamalanrea	16.912 (44.45%)	21.138 (55.55%)	38.050	?	?
Tamalate	33.817 (50.20%)	33.541 (49.80%)	67.358	?	?
Ujung Pandang	3.822 (34.31%)	7.319 (65.69%)	11.141	?	?
Ujung Tanah	7.362 (46.95%)	8.317 (53.05%)	15.679	?	?
Wajo	4.695 (37.12%)	7.954 (62.88%)	12.649	?	?
Total	264.245 (46.77%)	300.795 (53.23%)	565.040	19.366	584.406

Sumber: KPUD Makassar, 2018.

Dari tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa perolehan suara antara calon tunggal dengan kotak kosong berdasarkan tingkat kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar maka 13 kecamatan di menangkan oleh kotak kosong dan hanya 2 kecamatan di menangkan oleh calon tunggal, maka perolehan suara 300.795 atau 53 persen untuk kotak kosong sedangkan calon tunggal mengantongi suara sebanyak 264.245 atau 47 persen, meskipun perbedaan selisi suara tidak beda jauh tetapi itu menandakan bahwa perilaku pemilih yang ada di Kota Makassar belum memberikan mandat atau kepercayaan kepada pasangan calon tunggal untuk dijadikan sebagai walikota dan wakil walikota Makassar atau sebagai kepala daerahnya.

Kemudian perolehan suara secara keseluruhan dari 2 kecamatan yang menjadi tempat penelitian yaitu Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate sesuai dari hasil pilihan responden yaitu dapat dilihat berdasarkan pada uraian tabel 2.

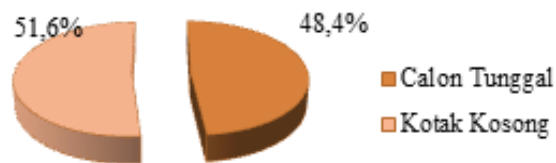
Berdasarkan tabel 2 dan gambar 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa responden menurut pilihannya yang berada di dua kecamatan yaitu kecamatan rappocini dan kecamatan tamalate, yang memilih kotak kosong dengan jumlah suara 129 suara dengan presentase 51,6%, yang

memilih calon tunggal jumlah suara 121 dengan persentase 48,4% sehingga perolehan selisi suara antara kotak kosong dengan calon tunggal yaitu 8 suara dengan presentase 3,2%.

Tabel 2. Perolehan Suara Pilihan Responden

No	Pilihan	Jumlah	Presentase
1	Calon Tunggal	121	48,4 %
2	Kotak Kosong	129	51,6 %
Jumlah		250	100 %

Sumber: Data primer, 2020.



Sumber: Data primer, 2020.

Gambar 1. Perolehan suara pilihan responden

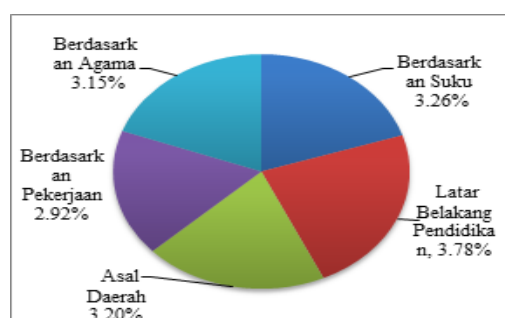
Pendekatan Sosiologi

Dalam pendekatan sosiologi yang berkaitan dengan perilaku pemilih tentunya memiliki pertimbangan yang menjadi variabel dalam menentukan pilihan, itu dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan indeks dan kategorinya:

Tabel 3. Kategori Indeks dalam Pendekatan Sosiologi

No	Variabel	Indeks	Kategori
1	Memilih berdasarkan suku	3,26	Sedang
2	Memilih berdasarkan latar belakang pendidikan	3,78	Tinggi
3	Memilih berdasarkan daerah asal	3,20	Sedang
4	Memilih berdasarkan pekerjaan	2,92	Sedang
5	Memilih berdasarkan agama	3,15	Sedang
Rata-Rata		3,26	Sedang

Sumber: Data Primer, 2020.



Sumber: Data primer, 2020.

Gambar 2. Pendekatan Sosiologi

Berdasarkan tabel 3 dan Gambar 2 di atas, untuk rata-rata indeks dari faktor sosiologi adalah 3,26 dengan kategori Sedang. Meskipun dilihat dari prespektif sosiologi mempunyai indeks kategori sedang berdasarkan suku, agama, asal Daerah dan pekerjaan tetapi dilihat dari pada latar belakang pendidikan mempunyai kategori yang tinggi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pratiwi (2017: 2) Menunjukkan bahwa perilaku politik dalam prespektif Sosiologis dimana terlihat berdasarkan dari faktor kedaerahan dan faktor lingkungan keluarga. Dalam hal ini respon dari masyarakat Kota Makassar sebagai pemilih tentu memiliki pertimbangan yang lain ketika menentukan sebuah pilihan sehingga latar belakang pendidikan yang menjadi pilihan untuk tidak mendukung calon tunggal meskipun melihat variabel yang lain ada keterkaitan namun belum masuk dalam kategori yang tinggi karena variabel lain tersebut ketika mengacu pada regulasi yang berlaku maka berhak bagi setiap warga Negara untuk ikut dalam mencalonkan diri sebagai calon kandidat kepala daerah baik dalam level provinsi maupun level kabupaten/kota.

Terhusus Kota Makassar yang merupakan Kota berkembang maka sebaiknya yang menjadi walikota adalah seseorang yang mempunyai refresentatif pendidikan dari arsitek yang tentu memiliki program kerja yang terarah dengan melihat realitas bukan seseorang yang berlatar belakang pebisnis seperti pendidikan yang dimiliki calon tunggal, karena melihat kondisi kota Makassar sekarang dalam proses pembangunan tentu membutuhkan pemimpin yang visioner yang dapat memajukan kota Makassar yang merupakan sebagai penyanggah perekonomian dikawasan timur Indonesia sehingga perbandingannya tidak beda jauh dengan kondisi kota-kota yang lain di Indonesia yang sudah maju dan berkembang lebih dulu.

Hal ini menandakan bahwa kekalahan dari calon tunggal karena pemilih melihat latar belakang pendidikannya yang berasal dari kalangan pebisnis dan juga merupakan orang baru dalam pemilihan walikota Makassar sehingga belum memiliki pengalaman untuk memimpin, belum lagi adanya partisipasi masyarakat yang sangat massif dalam memenangkan kotak kosong yang tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pemilih sehingga masyarakat Kota Makassar belum memberikan

kepercayaan kepada pasangan calon tunggal untuk dijadikan sebagai memimpinya.

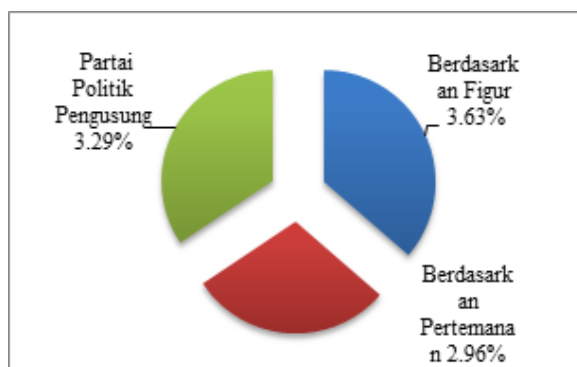
Pendekatan Psikologi

Dalam pendekatan Psikologi yang berkaitan dengan perilaku pemilih tentunya memiliki pertimbangan yang menjadi variabel dalam menentukan pilihan, itu dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan indeks dan kategorinya:

Tabel 4. Kategori indeks dalam pendekatan Psikologi

No	Variabel	Indeks	Kategori
1	Memilih berdasarkan ketokohan/figure	3,63	Tinggi
2	Memilih berdasarkan kekerabatan/pertemanan	2,96	Sedang
3	Memilih berdasarkan partai politik pengusung	3,29	Sedang
Rata-Rata		3,29	Sedang

Sumber: Data Primer, 2020.



Sumber: Data Primer, 2020.

Gambar. 3 Pendekatan Psikologi

Berdasarkan tabel 4 dan Gambar 3 diatas untuk rata-rata indeks dari faktor psikologi adalah 3,29 dengan kategori Sedang. Karena dilihat dari pada indeks pemilih baik yang pemilih kotak kosong maupun pemilih calon tunggal variabel figur/ketokohan yang memiliki indeks kategori yang tinggi, karena figur/ketokohan juga menjadi elektabilitas yang layak di pilih atau tidak serta deposito sosial yang sudah dilakukan kepada masyarakat, seperti halnya dengan calon tunggal yang merupakan figur pendatang baru dalam pemilihan walikota Makassar sehingga belum ada yang masyarakat bisa jadikan sebagai pertimbangan untuk memilihnya ditambah lagi yang menjadi lawan calon tunggal adalah kotak kosong yang menjadi simbol perlawanan calon petahan dalam hal ini danny pomanto tentunya masyarakat lebih memilih kotak kosong

karena bagian dari calon petahana yang sudah memimpin kota Makassar selama satu periode yang jelas sudah memiliki track record yang baik yang bisa menjadi alasan masyarakat cenderung untuk lebih memilih ditambah lagi bahwa Paslon petahana yang masih cukup populer, sehingga sebagian besar responden puas dengan kinerja Paslon petahana, mayoritas tidak mengetahui adanya pasangan kotak/ kolom kosong dan tidak mengetahui implikasi jika kotak/kolom kosong yang banyak dipilih atau menang (Kurniawan, 2018:19-27).

Meskipun variabel dari partai politik pengusung dan variabel pertemanan dari prespektif psikologi yang memiliki indeks dengan kategori sedang tetapi mempunyai pengaruh dengan kekalahan calon tunggal. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sangkoy et al. (2019) mengatakan bahwa pendekatan dalam prespektif psikologis menjadi yang cukup efektif untuk menarik hati suara masyarakat, sehingga kedekatan seseorang dengan orang lain dijadikan bahan kampanye bagi pasangan calon, selain melihat figur dari kandidat kepala daerah juga dilihat dari figur kandidat yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat, belum lagi hubungan psikologis dengan suatu organisasi atau partai politik yang sudah pasti dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memberikan hak suaranya.

Keberadaan semua partai politik yang berada di calon tunggal menjadi salah satu penyebab calon tunggal tidak dipilih oleh masyarakat karena sebagai pemilih masyarakat merasa tidak percaya kepada partai politik dan yang ada hanya kejenuhan dengan tidak adanya figur lain yang maju yang dianggap sebagai representatif untuk lebih demokrasi, meskipun hadirnya kotak kosong sebagai bagian dari demokrasi karena sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, tetapi keberadaan partai politik berpengaruh dan itu besar karena partai politik bagian dari proses demokrasi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang mempunyai kapasitas serta elektabilitas untuk ikut bertarung, sehingga masyarakat melihat ada keserakahan kepada calon tunggal untuk menguasai partai politik. Seperti hal yang dikemukakan Yunus (2018: 69-70) pemicu adanya calon tunggal di pilkada kota Makassar, karena pasangan calon yang ikut bertarung sudah menguasai semua dukungan partai politik,

maka tentu peluang bagi putra daerah/kandidat lain untuk ikut menjadi kontestasi sebagai calon walikota sudah tertutup, meskipun ada peluang lewat jalur perseorangan tetapi meknismenya tentu tidak mudah karena banyaknya tahapan-tahapan sebelum penetapan sebagai bakal calon, kemudian penyebab lain dari kekalahan calon tunggal karena adanya perbedaan dukungan partai politik antara pengurus tingkat daerah dan pengurus tingkat pusat.

Artinya bahwa meskipun keberadaan partai politik yang sudah dikuasai calon tunggal tidak menjadi sebuah jaminan untuk memenangkan sebuah kontestasi, bahkan menjadi sebuah problem bagi pasangan calon tunggal yang kalah dalam pemilihan walikota Makassar karena dijadikan sebagai pertimbangan untuk dapat dipilih, sehingga mayoritas masyarakat Kota Makassar lebih memilih kotak kosong yang dianggap sebagai refresentatif dengan hanya satu pasangan calon bahkan sekaligus perlawanan terhadap penguasa atau oligarki yang ada di Kota Makassar yang menjadi pendukung pasangan calon tunggal.

Pendekatan Pilihan Rasional

Dalam pendekatan Pilihan Rasional yang berkaitan dengan perilaku pemilih tentunya memiliki pertimbangan yang menjadi variabel dalam menentukan pilihan, itu dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan indeks dan kategorinya:

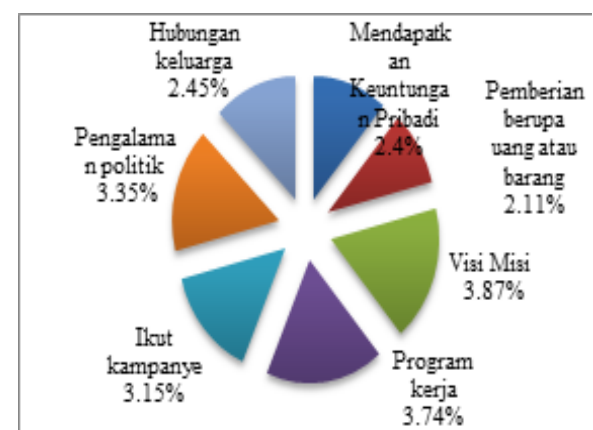
Tabel 5. Kategori indek dalam pendekatan Pilihan Rasional

No	Variabel	Indeks	Kategori
1	Memilih karena mendapatkan keuntungan pribadi	2,40	Rendah
2	Memilih karena pemberian berupa uang/ barang	2,11	Rendah
3	Memilih berdasarkan visi misi	3,87	Tinggi
4	Memilih berdasarkan program kerja	3,74	Tinggi
5	Memilih berdasarkan ikut kampanye	3,15	Sedang
6	Memilih berdasarkan pengalaman politik	3,35	Sedang
7	Memilih berdasarkan hubungan keluarga	2,45	Rendah
Rata-Rata		3,01	Sedang

Sumber: Data Primer, 2020.

Berdasarkan tabel 5 dan Gambar 4 di atas untuk rata-rata indeks dari faktor pilihan Rasional

adalah 3,01 dengan kategori indeks sedang. Pada faktor pilihan rasional secara indikator indeks memiliki kategori sedang tetapi pilihan dari pemilih tentu melihat beberapa variabel yang tentunya jadi pilihan sehingga lebih memilih kotak kosong daripada calon tunggal, kemudian jika dilihat daripada indeks pemilih kotak kosong dan pemilih calon tunggal variabel visi misi dan program kerja memiliki indeks dengan kategori yang tinggi. Sedangkan dilihat dari variabel pengalaman politik dan ikut kampanye memiliki indeks dengan kategori sedang yang tentu bagi calon tunggal sendiri ada pengaruh atas ketidakterpilihannya. Demikian juga dengan variabel hubungan keluarga, mendapatkan keuntungan pribadi serta pemberian berupa uang atau barang dengan kategori indeks rendah, tetapi hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Makassar yang sebagai pemilih sudah cerdas dalam berdemokrasi karena meskipun tanpa adanya pemberian uang atau barang serta mendapatkan keuntungan pribadi pemilih tetap ikut dalam menentukan pilihannya dan bukti timbulnya kesadaran para masyarakat kota Makassar meskipun dengan pilihan lebih memilih kotak kosong daripada calon tunggal. artinya bahwa dalam setiap perhelatan pesta demokrasi di seluruh Indonesia yang terkhusus di Kota Makassar money politik tentu hal yang tidak bisa dihilangkan karena bagi pasangan calon, cara apapun dapat lakukan untuk memperoleh kemenangan salah satunya pemberian uang atau barang bagi pemilih, tetapi ketika merujuk pada pada variabel memilih karena pemberian berupa uang atau barang dengan kategori rendah maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Makassar memilih bukan karena adanya pemberian dari calon tetapi adanya kesadaran pemilih dalam proses berdemokrasi.



Gambar 4. Pendekatan Pilihan Rasional

Hal itulah yang menyebabkan kekalahan dari pasangan calon tunggal dan selama dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia, di mana kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal pada pemilihan walikota Makassar, meskipun kasus yang sama kemenangan kotak kosong melawan pasangan calon tunggal terjadi pada pemilihan kepala daerah di kabupaten/pati, tetapi kemenangan kotak kosong yang terjadi di kabupaten/pati hanya terjadi beberapa kecamatan saja dengan perhitungan akhir kemenangan tetap berada di pasangan calon tunggal, berbeda dengan kasus yang terjadi pada pemilihan walikota Makassar dari hasil perhitungan akhir secara keseluruhan di menangkan oleh kotak kosong. Sehingga temuan dalam penelitian ini tentu merupakan fenomena baru yang terjadi di Indonesia.

SIMPULAN

Kontetasi yang terjadi pada pilkada kota Makassar adalah pertarungan antara kekuatan kecerdasan masyarakat Kota Makassar melawan oligarki politik, perlawanan masyarakat muncul karena masyarakat sederhana cara berpikirnya, dalam konteks politik nilai politik seseorang itu tergantung pada dirkusos sosial yang pernah dia buat. Kotak kosong ini terbentuk karena satu kandidat dipilih oleh semua partai politik dan gugurnya pasangan petahana sehingga berubah wujud jadi kotak kosong dan akhirnya beda prosesnya, artinya transformasi kekuatan suara rakyat itu dari kandidat petahana yang didiskualifikasi terus berubah menjadi kekuatan yang tidak pindah ke kandidat lain.

Dari Faktor Sosiologi, kecenderungan pemilih menentukan pilihan melihat berdasarkan latar belakang pendidikan pasangan calon, sehingga mengakibatkan kekalahan dari pasangan calon tunggal karena mempunyai latar belakang yang merupakan seorang pebisnis. Faktor Psikologi, perilaku pemilih melihat dari figure/ketokohan karena merupakan bagian dari elektabilitas dan kapasitas yang menjadi tolak ukur untuk dapat dipilih, ketika dilihat figur/ketokohan calon tunggal adalah merupakan seorang pendatang baru dalam pemilihan Walikota Makassar yang tentunya belum memiliki nilai jual/deposito sosial di masyarakat untuk dapat dipilih, demikian pula dari partai politik yang dominan hanya mengusung calon tunggal yang tentunya menjadi problem terhadap kekalahan calon tunggal karena

dianggap pragmatis dengan tidak memberikan kesempatan kepada calon lain untuk di usung sehingga menjadi bentuk kejenuhan dan efek perlawanan masyarakat terhadap partai politik maupun para elit dan penguasa di Kota Makassar yang telah menjadi bagian dari pasangan calon tunggal, karena calon tunggal menganggap ketika partai politik sudah dikuasai maka peluang untuk menang sangat besar karena simbol-simbol kekuatan sudah dipegang. Dari Faktor pilihan rasional memperlihatkan sebuah langkah maju di mana pemilih memilih berdasarkan pertimbangan rasional dengan melihat dari visi - misi pasangan calon, program kerja yang ditawarkan pasangan calon, kemudian memilih tanpa mendapatkan keuntungan pribadi dari pasangan calon. Kemampuan pemilih untuk menyeleksi secara rasional bukan adanya ikatan/hubungan kekeluargaan akan tetapi masyarakat Kota Makassar sudah cerdas dalam berdemokrasi karena tanpa pemberian imbalan pun mereka tetap ikut dalam memilih dan menentukan pilihannya, itu dibuktikan dengan kemenangan daripada kotak kosong.

Bagi peneliti lain, yang ingin melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini, tentu ikut mempertimbangkan variabel dan menggunakan metode analisis lain berbeda yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini untuk dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas dan lebih terperinci lagi tentang variabel yang lebih detail serta luas untuk penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Dalam proses demokrasi partai politik tentunya mempunyai peran yang sangat penting karena bagian dari pada proses demokrasi, tidak adanya kader yang di usung partai politik dalam pemilihan kepala daerah maka itu merupakan wujud dari kegagalan partai politik dalam proses kaderisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. V. R. (2018). Calon Tunggal vs “Barisan Juang Kotak Kosong” dalam Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018. In *FISIP Universitas Airlangga*. http://repository.unair.ac.id/81831/3/JURNAL_Fis.P.11_19_Abb_g.pdf
- Birch, S., London, C., & Dennison, J. (2017). How protest voters choose. *Party*

- Politics, March 2016.* <https://doi.org/10.1177/1354068817698857>
- Darmawan, I. (2017). Peran dan Strategi Kelompok “Kotak Kosong” dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Studi Pendahuluan. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11382>
- Djuyandi, Y. (2018). *Pengantar Ilmu Politik: Suatu Dasar Bagi Pemula* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Haliim, W. (2017). Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. *Politik Indonesia*, 2(2), 201–226.
- Khaerah, N., Junaedi, & Muslimin. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang. *Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 16–23.
- Kselman, D., & Niou, E. (2014). *Protest Voting in Plurality Elections : A Theory of Voter Signaling. September 2010.* <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9661-2>
- Kurniawan, B., & Wawanudin. (2019). Fenomena Pasangan Tunggal dan “Kotak/Kolom Kosong” Pada Pilkada Kota Tengerang. *Jurnal Moziak*, 11(2), 15–27.
- Kusuma, R. A., Subarkah, & Suparno. (2018). Analisis Propektif Pilkada Pasca Putusan Gugatan di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati). *Jurnal Suara Keadilan*, 19(2), 103–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3225>
- Mahardika, A. G. (2018). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 69–84. <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/3.Jurnal Bawaslu 01.pdf>
- Mikail, K. (2015). Pemilu dan Partai Politik di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019. *Tamaddun*, 15(1), 107–148. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>
- Moonti, R. M. (2019). Kemenangan Kotak Kosong (KOKO) dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Prosiding Seminar Nasional, September*, 445–451. <https://osf.io/bps5m/>
- Parahita, A. P. (2017). Kemenangan Kotak Kosong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), 51–60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21113>
- Pratiwi, N. V. (2017). Perilaku Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Mowila. *Wakapendik*, 2(3), 1–9. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/wakapendikips/article/view/2506>
- Rini, W. S. D. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143–160.
- Sangkoy, R., Lopian, M., & Gosal, R. (2019). Perilaku Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23299>
- Sari, M. V. J., & Fitriyah. (2019). Pengaruh Kampanye Negatif dan Keberpihakan Calon Petahana Kepada Pemodal Terhadap Perilaku Memilih Kotak Kosong (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 71–80. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/23558>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo.
- Yunus, N. R. (2018). Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 2(7), 69–70.